



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Juni 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

- Nama : HARYO ARIBOWO**
- Jabatan : KETUA PROGRAM SPESIALIS PROGRAM STUDI ILMU BEDAH**
- NHK : 1014771**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 6.000.000.000**

- Tanah dan Bangunan Seluas 467 m2/200 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
- Tanah Seluas 603 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 846 m2/250 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
- Tanah Seluas 228 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 877.000.000**

- MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000
- MOBIL, HONDA HRV Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
- MOBIL, MERCEDES C200 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
- MOTOR, HONDA CMX 500 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
- MOTOR, YAMAHA XMAX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000



6. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	409.995.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	993.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	8.279.995.000

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 8.279.995.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.